
COLLABORATION ON DAS CITARUM HANDLING THROUGH THE TNI BHAKTI PROGRAM AND LAW ENFORCEMENT IN THE FRAMEWORK OF MILITARY CAMPAIGN STRATEGY

Oleh

Andri Amijaya Kusumah¹, Surya Wiranto², Aris Sarjito³, Priyanto⁴, Buddy Suseto⁵, Lukman Yudho Prakoso⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: 6lukman.prakoso@idu.ac.id

Article History:

Received: 16-01-2023

Revised: 25-01-2023

Accepted: 06-02-2023

Keywords:

Collaboration, Citarum Watershed Handling, Bhakti TNI, Law Enforcement and Military Campaign Strategy

Abstract: *The management of the Citarum Watershed (Watershed) carried out through collaboration between the TNI (Indonesian Armed Forces) through the Regional Military Command (Kodam) III/Siliwangi and the Regional Government has so far not shown significant results. For this reason, this study aims to analyze the collaboration in handling the Citarum Watershed through the Bhakti TNI and law enforcement, using a qualitative method. Where from the research conducted it was found that the implementation of the Collaboration Bhakti TNI Kodam III/Siliwangi in the handling of the Citarum Watershed and law enforcement is still faced with sectoral egoism with supporting factors in the form of regulations so that multi-sector synergy with related stakeholders is integrated. Efforts carried out in collaboration in handling the Citarum watershed and law enforcement require the participation of environmentally conscious communities on the Citarum Riverbanks and Standard Operating Procedures (SOP)/Status Procedures (Protap), Memorandum of Understanding (MoU), as well as Working Relations Mechanisms in cooperation in the arrangement of the Citarum Watershed . Collaboration in handling the Citarum watershed through Bhakti TNI and law enforcement in supporting military campaign strategies requires synergy, speed and accuracy in moving people, infrastructure and equipment, as well as unity of command. To realize this, it was suggested to the President to issue a Presidential Regulation regarding the involvement of the Regional Military Commander III/Siliwangi as the person in charge of the ecosystem and environment, the need for education to increase the participation of environmentally conscious communities on the Citarum River Basin, as well as the formulation of SOP or Protap including MoU between components in pentahelix , Mechanism of Working Relations in accelerating the arrangement of the Citarum Watershed.*

PENDAHULUAN

Citarum merupakan salah satu sungai terpanjang dan terbesar yang berada di Provinsi

Jawa Barat, dan menjadi tumpuan hidup 15 juta jiwa manusia yang tinggal di 13 Kabupaten. Air dari sungai Citarum mengalir sekitar 42.000 Ha ladang dan sawah pertanian, peternakan, serta menghidupi 500 pabrik yang berada di DAS (Daerah Aliran Sungai) (Bappenas, 2018). Namun seiring berjalannya waktu, kualitas dan kuantitas air DAS Citarum mengalami penurunan sejalan dengan tingginya tingkat pencemaran akibat sampah maupun limbah-limbah yang berasal dari rumah tangga ataupun dari kegiatan industrialisasi, sehingga pemerintah dalam hal ini Presiden RI pada tahun 2018 mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI mengenai Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum yang banyak dilatarbelakangi oleh pembenahan fungsi sungai Citarum selama 3 (tiga) dekade yang masih belum menunjukkan hasil signifikan. Tahun demi tahun, banjir melanda areal yang lebih luas dari tahun sebelumnya dan seluruh aliran tercemar limbah berbahaya, meski pemerintah Indonesia telah dibantu Bank Dunia untuk menormalisasi DAS Citarum, namun tetap saja berujung dengan hasil yang tidak memuaskan.

Dalam pembenahan DAS Citarum selama ini, dana dan anggaran yang dikeluarkan berupa ICWRMIP (*Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program*) atau Program Investasi Manajemen Sumber Daya Air Citarum Terpadu dengan nilai yang cukup fantastis mencapai Rp 9.000.000.000.000 (Sembilan Trilyun Rupiah), dimana dana tersebut berasal dari pinjaman luar negeri, dana anggaran pusat (APBN/Anggaran pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Permasalahan DAS Citarum menurut (Prakoso, Suhirwan, Sianturi, Adriyanto, & Damayanti, 2019) memiliki 6 (Enam) pokok masalah yakni tingginya sedimentasi, kegundulan hutan di hulu Sungai Citarum yang terletak di Kecamatan Kertasari dan Pacet Kabupaten Bandung, penurunan muka air tanah dengan rata-rata penurunan sekitar 8,3 cm/th, pembuangan sampah rumah tangga hingga mencapai 9.000 meter kubik, limbah industri yang dibuang ke sungai tanpa melalui proses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta menurunnya ketersediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat se-Bandung Raya yang menggambarkan kompleksnya permasalahan yang terjadi. Dengan kondisi permasalahan yang dihadapi DAS Citarum tersebut, maka nilai strategis DAS bagi kepentingan pertahanan terutama terhadap strategi kampanye militer menjadi berkurang (Madrohim & Prakoso, 2021). Dimana, seharusnya, air yang mengalir sepanjang DAS Citarum apabila dalam kondisi bersih dapat mengalir pertanian yang menghasilkan berbagai sumber bahan pokok seperti padi, jagung dan palawija dapat didayagunakan untuk cadangan logistik dalam rangka mendukung fungsi pertahanan (Suhirwan L. Y., 2018). Namun hal tersebut menjadi tidak terwujud, karena pencemaran DAS Citarum tersebut mengakibatkan airnya tidak dapat dipergunakan secara maksimal untuk mengalir sawah maupun ladang. Sejak direncanakannya program pemulihan Citarum yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh unsur dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan keterlibatan serta peranserta dari TNI melalui Kodam III/Siliwangi, terdapat kemajuan yang cukup menggembirakan, karena kualitas Air Citarum pada tahun 2021 dari semula berstatus "Cemar Berat" berubah secara signifikan menjadi menjadi "Cemar Ringan". Perubahan status "pencemaran" tersebut tidak terlepas dari adanya keberhasilan seluruh stake holder terkait yang saling berkolaborasi dalam penanganan DAS Citarum melalui Bhakti TNI dan penegakan hukum. Dalam hal ini, Pemprov Jabar yang didukung oleh TNI melalui Kodam

III/Siliwangi secara bersama-sama mencanangkan “Program Gerakan Citarum Harum” sebagai wujud dari implementasi kegiatan Bhakti TNI yang merupakan salah satu metode Pembinaan Teritorial. Gerakan Citarum Harum sendiri merupakan wujud dukungan Kodam III/Siliwangi terhadap gerakan Citarum Bestari (Bersih, Sehat, Indah, dan Lestari) yang dicanangkan oleh Pemprov.Jabar dengan tujuan agar sungai Citarum bersih dari sampah dan limbah. Dimana dalam gerakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat merangkul personel TNI-Polri dan berbagai lapisan masyarakat untuk program ini. Gerakan Citarum Harum yang dicanangkan oleh Kodam III/Siliwangi merupakan salah satu bentuk dari implementasi Bhakti TNI yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup di Bantaran Sungai.

Kolaborasi penanganan DAS Citarum melalui Bhakti TNI dan penegakan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh Kodam III/Siliwangi, Direktorat Penegakkan Hukum Dinas LHK Provinsi Jawa Barat sebagaimana tersebut diatas dapat mendukung sepenuhnya penyelenggaraan strategi kampanye militer. Karena, dengan penanganan DAS Citarum tersebut memungkinkan dapat terkendalikannya tingkat pencemaran DAS Citarum, sehingga keberadaan DAS Citarum yang berada dalam kondisi bersih disamping dapat mendukung ketersediaan sumber air yang bersih bagi pasukan, juga dapat menopang ketersediaan jaring-jaring jalan pendekat untuk mobilitas pasukan saat berlangsung penyelenggaraan rangkaian kegiatan kampanye militer melalui jalur sungai ketika jalur darat mengalami hambatan, difungsikan sebagai jalur penyeberangan melalui gelar jembatan darurat (Kurniawan, Widyarto, & Prakoso, 2020). Disamping itu, dengan keberadaan sepanjang DAS Citarum juga dapat dimaksimalkan fungsinya sebagai rintangan alam untuk menghambat gerak maju musuh yang berusaha mendekati pusat ibukota Jawa Barat maupun ibukota Negara Republik Indonesia di DKI Jakarta, mengingat Jawa Barat merupakan daerah penopang dari ibukota RI DKI Jakarta, termasuk mendukung ketersediaan sumber cadangan logistik dengan mengalirnya air DAS Citarum ke areal persawahan dan perladangan masyarakat.

Kegiatan Bhakti TNI dan penegakan hukum dalam Gerakan Citarum Harum yang dilakukan oleh Kodam III/Siliwangi bersama dengan Dirgakkum LHK Provinsi Jawa Barat dan unsur Polda Jawa Barat tersebut telah mendapat apresiasi dan penghargaan dari pimpinan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat sehingga tumbuh rasa optimisme bahwa melalui kolaborasi penanganan DAS Citarum tersebut akan mampu membawa perubahan secara masif bagi Sungai Citarum. (Prakoso, Suhirwan, Prihantoro, & Kasih., 2020)

Dalam kolaborasi penanganan DAS Citarum melalui Bhakti TNI dan penegakan hukum tersebut selama ini masih dihadapkan pada persoalan adanya egoisme sektoral, belum maksimalnya penegakan hukum yang dilaksanakan serta kekurang paduan program penanganan DAS Citarum Harum dengan Program Bhakti TNI yang disusun Kodam III/Siliwangi yang berdampak pada terjadinya kekurangsinkronan pada realisasi penanganan DAS Citarum. Sejalan dengan hal tersebut, melihat pentingnya kolaborasi penanganan DAS Citarum melalui Bhakti TNI dan Penegakan Hukum, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kolaborasi Penanganan DAS Citarum melalui Bhakti TNI dan Penegakan Hukum dalam rangka Strategi Kampanye Militer (Wayan Redita, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu untuk menganalisis kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realistik sosial terkait penanganan DAS Citarum yang dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, TNI dan unsur lain yang terkait dalam kegiatan Bhakti TNI dan penegakan hukum.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung melalui wawancara terhadap para pejabat di Makodam III/Siliwangi, Pemprov.Jawa Barat, Dinas LHK RI Provinsi Jawa Barat, Polda Jawa Barat, Pemkab Bandung, dan Kantor BBWS Jawa Barat. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 (dua) bulan yaitu dari bulan Nopember 2022 sampai dengan Januari 2023.

Subjek dan Objek Penelitian

subjek penelitian pada penelitian ini Asops Kasdam III/Siliwangi, Aster Kasdam III/Siliwangi, Karoops Polda Jabar, Kadis LHK Prov.Jabar, Dirgakkum LHK Jabar serta Tokoh Pegiat Lingkungan yang memiliki kedudukan sentral dalam penelitian karena data tentang gejala atau variabel atau masalah kolaborasi penanganan DAS Citarum, Bhakti TNI dan penegakan hukum. Dengan demikian, Asops Kasdam III/Siliwangi, Aster Kasdam III/Siliwangi, Karoops Polda Jabar, Kadis LHK Prov.Jabar, Kepala BBWS Jawa Barat merupakan subjek penelitian yang menjadi narasumber atau informan yang kompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti melalui sesi wawancara yang dilakukan.

Obyek atau yang menjadi fokus penelitian ini adalah kolaborasi penanganan DAS Citarum melalui Bhakti TNI dan Penegakan Hukum dalam rangka Strategi Kampanye Militer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Bhakti TNI Kodam III/Siliwangi dalam Penanganan DAS Citarum.

Implementasi Bhakti TNI Kodam III/Siliwangi mulai dari kegiatan pembersihan sampah, reboisasi, edukasi terhadap masyarakat menjadi bukti bahwa Kodam III/Siliwangi berusaha semaksimal mungkin berpartisipasi aktif dalam membantu penanganan DAS Citarum untuk kepentingan pembangunan nasional di daerah. Kegiatan Bhakti TNI Kodam III/Siliwangi tersebut mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari masyarakat dan unsur pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta komponen masyarakat, yang dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap para narasumber seperti Kadis LHK Jabar dan Pemprov.Jabar dan tokoh-tokoh masyarakat, merasa terbantu dengan apa yang dilakukan oleh Kodam III/Siliwangi.

Dalam implementasi Bhakti TNI Kodam III/Siliwangi pada penanganan DAS Citarum tersebut, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, keberhasilannya tidak terlepas dari adanya dukungan dan peran serta dari unsur-unsur dari Pemprov.Jabar, Dinas LHK Jabar, unsur Muspida maupun Muspika lainnya termasuk unsur dari Polda Jabar. Pengerahan sumber daya personel, peralatan maupun anggaran dan logistik lainnya dalam penyelenggaraan Bhakti TNI, menjadi hal yang sangat krusial untuk diperhatikan agar dapat tetap terjamin ketersediaannya dalam internal Kodam III/Siliwangi sendiri maupun dukungan kalangan eksternal.

Kegiatan Bhakti TNI Kodam III/Siliwangi merupakan dukungan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait dalam penataan DAS Citarum, agar anggaran

dan biaya besar yang dikeluarkan selama ini dari APBN maupun APBD dapat memiliki hasil yang seimbang (Prakoso, Duha, Setiadi, & Kusmiati., Perang ekonomi, 2021,). Karena pada dasarnya setiap program Bhakti TNI yang dicanangkan secara konsep sebenarnya sudah memenuhi harapan namun pada kenyataannya belum idak menunjukkan hasil sesuai rencana, dan bahkan menuai kritik dari dari berbagai kalangan karena di anggap hanya untuk kepentingan politik dan ego sektoral (Narindra & Sudiby, 2021). Kedepan, harapan Citarum kembali kepada kejayaan masa lalu sebagai urat nadi kehidupan di Jawa Barat dapat kembali hidup. Dalam hal ini, melalui Bhakti TNI yang diselenggarakan maka penanganan sampah dan limbah dapat dilaksanakan secara massive.

Pada penyelenggaraan Bhakti TNI Kodam III/Siliwangi dalam penanganan DAS Citarum, Kodam III/Siliwangi memerlukan sinergitas, kecepatan dan ketepatan dalam manajemen yang meliputi upaya menggerakkan manusia, sarana prasarana dan peralatan, serta kesatuan komando menjadi sangat penting (Prakoso L. Y., 2018). Oleh karena itu, sudah saatnya dipikirkan langkah yang lebih terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan institusi terkait secara tepat. Instansi terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah, Dinas Lingkungan hidup dan BBWS dapat meningkatkan kerjasama dengan Kodam III/Siliwangi dalam percepatan penataan DAS Citarum (Suhirwan & Prakoso, 2018). Melalui program Karya Bhakti TNI hal ini menjadi salah satu solusi mengingat TNI memiliki kesiapan personel yang senantiasa siap untuk digerakkan, sarana prasarana peralatan dan transportasi yang memadai serta organisasi yang solid sehingga memungkinkan untuk mewujudkan percepatan penataan DAS Citarum sesuai dengan target yang ditentukan. (Listiyono, Prakoso, & Sianturi, 2019)

Keterlibatan serta kesiapan Kodam IISiliwangi dalam membantu penataan DAS Citarum melalui Bhakti TNI bertujuan agar permasalahan DAS Citarum terkait penanganan lahan kritis, sampah dan limbah serta dampak yang lebih luas yaitu krisis air dan kerusakan ekosistem lingkungan hidup dapat teratasi secara optimal. Dengan menggunakan instrumen penelitian sesuai dengan konsep Bhakti TNI pada penanganan DAS Citarum yang begitu kompleks dapat diidentifikasi, dan direalisasikan secara optimal guna memastikan faktor penyebab baik karena faktor alam (Fatimah, Prakoso, & Sudiarso, 2022), kelalaian maupun kesengajaan dimana mengacu kepada program sebelumnya yang belum menunjukkan hasil yang diharapkan.

Terkait dengan hal tersebut, sejalan dengan masih panjangnya waktu yang ditetapkan dalam percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum sampai tahun 2025 mendatang, maka seyogyanya sudah mulai ada pembicaraan guna menentukan pihak mana yang akan menjadi “ujung tombak” dalam penanggulangan Sungai Citarum selanjutnya, terutama ketika TNI dan Polri tidak lagi dilibatkan dalam Gerakan Citarum Harum. Walaupun keterlibatan TNI dan Polri masih ada, namun pengurangan secara signifikan peran dari Kodam III/Siliwangi dan Polda Jawa Barat, maka siapa yang harus menjadi ujung tombak agar program ini dapat tetap berjalan harus segera dapat ditemukan solusinya (Suhirwan & Prakoso, 2019).

Maka koordinasi antar dinas/instansi program Karya Bhakti TNI dalam percepatan penataan DAS Citarum di Wilayah Jawa Barat sudah terlaksana secara optimal. Permasalahan Sungai Citarum sangat kompleks, sehingga membutuhkan sinergitas berbagai kalangan dalam penanganannya. Dengan sinergitas, maka akan terjalin hubungan yang baik, saling mendukung dengan semangat sabilulungan dan konsisten untuk semua

upaya penanganan DAS Citarum yang manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Gerakan Citarum Harum yang dicanangkan oleh Kodam III/Siliwangi merupakan salah satu bentuk dari implementasi kebijakan dari pemerintah pusat dan kegiatan Pembinaan Teritorial khususnya Bhakti TNI guna meningkatkan kesadaran masyarakat di Bantaran Sungai terhadap lingkungan hidup (Prakoso, Suhirwan, & Prihantoro, Bahan Ajar Kebijakan Pertahanan Laut, 2021). melalui Program Gerakan Citarum Harum Kodam III/Siliwangi dapat membantu mengatasi masalah Sungai Citarum. Karena apabila ditinjau secara filosofis, normatif dan sosial budaya, maka masalah Citarum tidak akan terselesaikan apabila tidak ada sinergitas multi sektor bersama masyarakat secara terintegrasi dalam wadah koordinasi, melalui metode struktur dan metode non struktur yang harus seimbang (Sulistiawan, et al., 2022).

Selain itu dalam kegiatan Bhakti TNI untuk penanganan DAS Citarum, maka Program Strategis Nasional penataan DAS Citarum dapat diwujudkan, yaitu terwujudnya normalisasi sedimentasi di dasar aliran sungai Citarum, tertanganinya lahan kritis di sekitar hulu Sungai Citarum Kec.Kertasari dan Pacet Kab.Bandung), terkendalikannya penurunan air tanah, tertanganinya sampah yang dibuang di sekitar bantaran sungai ke Sungai Citarum, terwujudnya pengolahan limbah Limbah cair melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), teratasinya Defisit ketersediaan air minum untuk wilayah Bandung Raya dan wilayah Jawa Barat serta DKI Jakarta pada umumnya, serta terwujudnya kualitas baku mutu air dari cemar berat menjadi normal.

Faktor – factor yang mendukung kolaborasi penanganan DAS Citarum melalui Bhakti TNI dan penegakan hukum.

Beberapa faktor yang mendukung kolaborasi penanganan DAS Citarum melalui Bhakti TNI dan Penegakan Hukum, yakni bahwa (Ernes, Prakoso, & Risman, 2022): (1) Kegiatan Bhakti TNI dalam Gerakan Citarum Harum yang diselenggarakan secara konsisten dengan jadwal yang rutin, pengerahan sumber daya personel, peralatan dan anggaran oleh Kodam III/Siliwangi dan satuan-satuan jajarannya yang terbagi kedalam beberapa sektor, serta adanya dukungan stake holder terkait pada tiap penyelenggaraan Bhakti TNI yang diselenggarakan menjadi faktor yang mendukung kolaborasi penanganan DAS Citarum. (2) Peran, fungsi dan tugas dari Dirgakkum Dinas LHK Provinsi Jawa Barat selaku penanggung jawab dalam penegakan hukum terhadap para pelaku pencemaran lingkungan (membuang sampah rumah tangga dan limbah industri pabrik) dapat dilaksanakan secara konsisten dan dengan komitmen tinggi dalam rangka memberikan efek jera terhadap para pelaku pelanggar tersebut. Hal tersebut sesuai wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Kadis Gakum LHK Provinsi Jawa Barat. (3) Dukungan dari unsur Polda Jabar untuk turut membantu Dirgakum Dinas LHK Jabar dalam penegakan hukum melalui tindakan penangkapan sampai dengan penuntutan di Meja Pengadilan dengan keterlibatan pihak Kejaksaan Negeri dan Kehakiman Provinsi Jawa Barat menjadi faktor yang sangat mendukung keberhasilan dalam penegakan hukum, sehingga berhasil menurunkan angka kasus penangkapan para pelaku pencemaran lingkungan. (4) Aturan atau regulasi berupa perundang-undangan yang mengatur pengenaan pasal perdata maupun pidana termasuk pengenaan sanksi sosial secara konsisten menjadi faktor yang sangat mendukung dalam kolaborasi penanganan DAS Citarum melalui Bhakti TNI dan penegakan hukum.

Upaya yang dilaksanakan dalam kolaborasi penanganan DAS Citarum melalui Bhakti TNI dan penegakan hukum.

Kolaborasi penanganan DAS Citarum melalui Bhakti TNI dan penegakan hukum yang selama ini diselenggarakan banyak melibatkan unsur-unsur dari pemerintah di tingkat Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Kota, termasuk TNI melalui Kodam III/Siliwangi, komunitas lingkungan hidup, Dinas LHK Provinsi Jawa Barat dan unsur Polda Jawa Barat. Dari hasil pengumpulan data primer dan sekunder melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi serta laporan-laporan terkait penanganan DAS Citarum setelah dilakukan pengolahan data diperoleh beberapa upaya yang dilaksanakan dalam kolaborasi penanganan DAS Citarum melalui Bhakti TNI dan penegakan hukum sebagai berikut (Yudho, 2020) : (1) Pemerintah Pusat melalui Presiden RI mengeluarkan Perpres pengendalian pencemaran DAS Citarum yang ditindaklanjuti oleh Peraturan-peraturan Kementerian LHK RI sebagai penjabaran dari Perpres yang dikeluarkan oleh Presiden RI. (2) Pemerintah di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota mengeluarkan Pergub dan Perbup/Perwalkot dan Perda-perda berkaitan dengan pengendalian pencemaran DAS Citarum. (3) Koordinasi lintas sektoral antara Pemprov.Jabar, Dinas LHK Provinsi Jabar, unsur Kodam III/Siliwangi, unsur Polda Jabar, Dirgakkum Dinas LHK Provinsi Jawa Barat diselenggarakan secara parsial maupun rutin untuk membahas perkembangan penanganan DAS Citarum melalui Rapat Koordinasi Satgas. (4) Pengerahan sumber daya personel, peralatan dan anggaran dalam internal Kodam III/Siliwangi dalam menunjang operasionalisasi kegiatan Bhakti TNI pada Gerakan Citarum Harum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan yang sudah di deskripsikan serta dianalisis di atas dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti bahwa:

1. Implementasi Kolaborasi Bhakti TNI Kodam III/Siliwangi pada penanganan DAS Citarum dan penegakan hukum yang dilaksanakan selama ini melalui program Karya Bhakti TNI baik secara fisik dan nonfisik, edukasi masyarakat dengan memberikan contoh pola hidup pengelolaan lahan, hutan dan sungai dengan orientasi pendekatan kesejahteraan, penyusunan program dengan pelibatan dinas / instansi terkait di wilayah dengan melakukan pengawalan program, mempersempit jurang pemisah antara masyarakat perkotaan dan pedesaan merupakan solusi penting dan selaras dengan pelaksanaan program pemerintah daerah yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat harus segera di wujudkan oleh pemerintah yang menjadi pedoman bagi Mabes TNI. Kebijakan relevansi nya dengan program Karya Bhakti TNI yang di susun mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran dengan memfungsikan seluruh kemampuan yang ada dalam Satgas Citarum Harum sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta keterlibatan stakeholder yang memiliki peran sebagai pengawas kegiatan dalam ini BBWS, Dinas PUPR maupun Bapermades maupun bapermades sehingga terjadi relevansi yang sinergi dalam pelaksanaannya. Mengingat kompleksitas permasalahan dan banyaknya keterlibatan dinas/instansi, stakeholder terkait maka program yang dilaksanakan relevan dengan implementasi kampanye Militer pada masa damai, sehingga menjadi pilot project bagi kegiatan di wilayah lain.

2. Faktor-faktor yang mendukung kolaborasi penanganan DAS Citarum melalui Bhakti TNI dan penegakan hukum yaitu adanya regulasi agar sinergitas multi sektor bersama stakeholder terkait secara terintegrasi dalam meningkatkan percepatan penataan DAS Citarum (peraturan/perundang-undangan) bersifat operasional dilapangan dan aplikatif, belum optimalnya penjabaran *Standard Operating Procedure* (SOP)/Prosedur Tetap (Protap), serta pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama penataan DAS antara semua Stakeholder, sehingga penjabaran secara komprehensif terhadap peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan tugas Karya Bhakti TNI guna Percepatan Penataan DAS Citarum, solusi pentingnya adalah dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP)/Prosedur Operasi Tetap (Protap), dan Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama antara semua Stakeholder merupakan hal mutlak untuk mewujudkan Karya Bhakti TNI yang mampu bersinergi dalam percepatan penataan DAS Citarum.
3. Upaya yang dilaksanakan dalam kolaborasi penanganan DAS Citarum dan penegakan hukum masih memerlukan partisipasi masyarakat sadar lingkungan di Bantaran Sungai Citarum dan *Standard Operating Procedure* (SOP)/Prosedur Tetap (Protap), Memorandum of Understanding (MoU), Mekanisme Hubungan Kerja yang jelas dalam kerjasama percepatan penataan DAS Citarum. Untuk itu, perumusan, penyusunan dan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penataan DAS Citarum yang mengedepankan fungsi Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengamatan dan Pengintaian (K4IPK), kampanye masyarakat sadar lingkungan, keterlibatan masyarakat secara totalitas menjadi kekuatan untuk mewujudkan program penataan DAS Citarum dengan maksimal, penerapan Peraturan Daerah maupun pusat dan hukum yang berlaku, *penyusunan* Rencana Aksi Percepatan penataan DAS Citarum secara terpadu yang melibatkan seluruh *stakeholder* terkait tugas, peran dan fungsi merupakan solusi penting yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah guna dijadikan pedoman oleh Satuan Tugas Citarum Harum dalam mempercepat penataan DAS Citarum. Kemudian harus dijabarkan *Standard Operating Procedure* (SOP)/Prosedur Tetap (Protap), Memorandum of Understanding (MoU), Mekanisme Hubungan Kerja yang jelas dalam kerjasama percepatan penataan DAS Citarum antara semua Stakeholder dengan melibatkan Gubernur, Pangdam III/Slw, Kapolda, Kepala BBWS, Naradamping/Sekda Provinsi/Kabupaten serta Dinas PUPR maupun Dinas Lingkungan Hidup.

REKOMENDASI

Setelah melewati rangkaian penelitian maupun analisa yang disertai pembahasan pada uraian di atas maka saran yang disampaikan peneliti adalah :

1. Saran teoritis, bagi peneliti lain agar mampu melakukan penelitian lebih mendalam terhadap kolaborasi penanganan DAS Citarum dan penegakan hukum dalam rangka strategi kampanye militer.
2. Saran Praktis kepada :
 - a. Dalam rangka mewujudkan Implementasi Kolaborasi Bhakti TNI Kodam III/Siliwangi pada penanganan DAS Citarum dan penegakan hukum yang dilaksanakan selama ini melalui program Karya Bhakti TNI baik secara fisik dan

nonfisik, edukasi masyarakat dengan memberikan contoh pola hidup pengelolaan lahan, hutan dan sungai dengan orientasi pendekatan kesejahteraan, penyusunan program dengan pelibatan dinas / instansi terkait di wilayah dengan melakukan pengawalan program, mempersempit jurang pemisah antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, dengan adanya Peraturan Presiden merupakan keputusan politik negara sebagai legalisasi dari program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat dalam hal ini keterlibatan Pangdam III/Siliwangi sebagai penanggungjawab bidang ekosistem dan lingkungan hidup terealisasi secara optimal di dukung oleh stakeholder terkait dan dalam pengawasan langsung Kemenko Marvest.

- b. Guna mewujudkan faktor-faktor yang mendukung kolaborasi penanganan DAS Citarum melalui Bhakti TNI dan penegakan hukum dimana adanya regulasi agar sinergitas multi sektor bersama stakeholder terkait secara terintegrasi dalam meningkatkan percepatan penataan DAS Citarum (peraturan/perundang-undangan) bersifat operasional dilapangan dan aplikatif, belum optimalnya penjabaran Standard Operating Procedure (SOP)/Prosedur Tetap (Protap), serta pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama penataan DAS antara semua Stakeholder, maka dalam pelaksanaan penataan DAS Citarum menghadapi berbagai konflik kepentingan yang tidak sederhana sehingga dengan kehadiran TNI melalui program Karya Bhakti skala besar dan dengan soft approach perlu dilaksanakan secara tuntas agar hasilnya mampu di ukur dan dijadikan sebagai pilot project maupun laboratorium lingkungan terbesar dalam penataan DAS di Indonesia hal ini menjadi penting apabila program ini berhasil maka Kebijakan, SOP, MoU, Protap dan peran stake holder dalam organisasi menjadi acuan dan pedoman bagi penataan ekosistem dan lingkungan di Indonesia dan juga international.
- c. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka kolaborasi penanganan DAS Citarum dan penegakan hukum diperlukan partisipasi masyarakat sadar lingkungan di Bantaran Sungai Citarum dan Standard Operating Procedure (SOP)/Prosedur Tetap (Protap), Memorandum of Understanding (MoU), Mekanisme Hubungan Kerja yang jelas dalam kerjasama percepatan penataan DAS Citarum, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan mengintruksikan kepada para Pangkotama, dalam rangka pelaksanaan penanganan ekosistem dan lingkungan hidup bisa dilaksanakan dengan optimal maka TNI khususnya satuan kewilayahan bersama Instansi terkait memberikan bimbingan teknis kepada Satgas dan masyarakat terkait pengetahuan dan keterampilan tentang lingkungan, terbentuknya Desa-Desa Peduli Lingkungan yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pertahanan dan keamanan, pelestarian ekosistem dan lingkungan hidup maupun budaya bangsa, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat termasuk dalam kaitannya dengan optimalnya Karya Bhakti TNI dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam penataan DAS di Indonesia dalam rangka membantu Pemerintah Daerah sebagai perwujudan Kampanye Militer pada Operasi Militer Selain Perang , hal ini tentunya perlu koordinasi instens dengan dengan Gubernur Jawa Barat selaku Komandan Satgas Citarum Harum perlu melanjutkan kebijakan Pemerintah Pusat secara

berkesinambungan program revitalisasi Pemerintah Pusat sudah selesai dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun yaitu setelah tahun 2025 tetap melanjutkan program dalam bentuk pemeliharaan DAS Citarum, pelibatan stakeholder/ dinas terkait dan TNI di wilayah, sehingga hasil yang sudah diperoleh mampu di pelihara dan di pertahan kan serta di tingkatkan hal ini tentunya perlu menumbuhkan budaya lokal dengan istilah-istilah terdahulu yang sudah pernah dilaksanakan seperti Citarum BESTARI, Citarum PEDULI, Bandung BERHIBER, yang menjadi populer di Indonesia, dan tentunya DAS Citarum sebagai laboratorium ekosistem dan lingkungan hidup terbesar di Indonesia mampu memberikan kontribusi besar bagi dunia international. Kondisi ini pun selaras dengan citra Jawa Barat sebagai destinasi wisata sehingga pelaksanaan penataan DAS sungai Citarum pun mampu diwujudkan dalam bentuk Museum Edukasi Penataan DAS agar masyarakat tidak melupakan upaya serius yang sudah dilaksanakan dan ternyata berhasil di wujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bappenas, R. (2018). *Kajian – model – pengelolaan daerah aliran Sungai DAS Terpadu*. Jakarta,: Pustaka media.
- [2] Eka, Rantau Isnur; Hadisancoko, Rizerius Eko; Prakoso, Lukman Yudho; (2022). Optimalisasi Sinergitas TNI, POLRI Dan Kemeterian/Lembaga Dalam Penanggulangan Kelompok Teroris Papua Guna Mewujudkan Keutuhan NKRI. *Jurnal Inovasi Penelitian*.
- [3] Ernes, E., Prakoso, L. Y., & Risman, H. (2022). Strategi Perang Semesta Melalui Pemberdayaan Fungsi Hubungan Masyarakat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. *Strategi Perang Semesta*, 6,2,208-233,.
- [4] Fatimah, A., Prakoso, L. Y., & Sudiarso, A. (2022). Strategi Pertahanan Laut Indonesia Melalui Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut. *Strategi Pertahanan Laut*, 7,3,173-184.
- [5] Harris, Amora; Prakoso, Lukman Yudho; Sianturi, Dohar. (2021). Strategi Pertahanan Laut dalam Rangka Ancaman Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia II. *Journal of Social and Political Sciences*,, Vol.4 No.2 (2021), 5(1), 15–30.
- [6] Kurniawan, C., Widarto, S., & Prakoso, L. Y. (2020). Implementasi Struktur Birokrasi Strategi Pertahanan Laut Menghadapi Ancaman di Perairan Provinsi Sulawesi Tenggara. *Strategi Pertahanan Laut*,, Vol 4 No 1.
- [7] Listiyono, Y., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Membangun kekuatan laut indonesia dipandang dari pengawal laut dan deterrence effect indonesia building indonesian sea power based on the indonesian sea guard and deterrent effect. *Strategi Pertahanan Laut*, 5,1,73-84.
- [8] Madrohim, M., & Prakoso, L. Y. (2021). The Total War Strategy Through the Improvement of the Role of National Shipyard in Supporting Main Weapon System of Indonesian Navy. *Journal of Social and Political Sciences, The Asian Institute of Research*, 4,1,1-10.
- [9] Mulyadi, M., Prakoso, L. Y., & Mudhio, I. W. (2021). Konforontasi Militer Pembebasan Papua Barat Dalam Perspektif Strategi Perang Semesta. *Jurnal Inovasi Penelitian*.
- [10] Narindra, K. S., & Sudiby, L. Y. (2021). *The Role of Strategic Diplomacy in the National*

Nuclear Power Plant Development Plan in Indonesia in Supporting Energy and National Defense. CV. Aksara Global Akademia.

- [11] Nurbantoro, E., Midhio, I. W., Risman, H., Prakoso, L. Y., & Widjayanto, J. (2021). Perang Kemerdekaan Indonesia (1945-1949) dalam Perspektif Strategi Perang Semesta. *Pendidikan Tambusai*.
- [12] Prakoso, L. Y. (2018). Strategi Maritim Penanganan Kejahatan Lintas Negara Di Perbatasan Laut Indonesia Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Maritim*.
- [13] Prakoso, L. Y. (2020). penguatan pertahanan negara melalui peningkatan keamanan laut di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- [14] Prakoso, L. Y. (2021). Sistem Pertahanan Negara Di Laut.
- [15] Prakoso, L. Y., Duha, J., Setiadi, M. I., & Kusmiati. (2021). *Perang ekonomi*. CV. Aksara Global Akademia.
- [16] Prakoso, L. Y., Duha, J., Setiadi, M. I., & Kusmiati. (2021,). *Perang ekonomi*. jakarta: CV. Aksara Global Akademia.
- [17] Prakoso, L. Y., Suhirwan, & Prihantoro, K. (2021). *Bahan Ajar Kebijakan Pertahanan Laut*. Unhan Press.
- [18] Prakoso, L. Y., Suhirwan, Prihantoro, & Kasih. (2020). Sea defense strategy and urgency of forming maritime command center. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi Ttg Kajian & Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*, 6,2,200-211.
- [19] Prakoso, L. Y., Suhirwan, Sianturi, D., Adriyanto, A., & Damayanti, R. (2019). Implementasi kebijakan Pokok-Pokok Penyelenggaraan Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia dalam Menanggulangi Bencana Alam. *Proceeding ICDM*. Jakarta: indonesia defence university.
- [20] Pramono, B., & Prakoso, L. Y. (2021). Political Policy for the Papuan Issue in the Context of National Defense.
- [21] Sartono, S., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Kebijakan Pemerintahan Dalam Upaya Penanganan Illegal Fishing Dalam Sudut Pandang Pertahanan Negara di Laut . *Strategi Pertahanan Laut*.
- [22] Suhirwan, & Prakoso, L. Y. (2018). Membangun Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan Studi pada Masyarakat Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat dalam Rangka pada Masyarakat Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat dalam Rangka Pertahanan Negara. *Indonesia Qualitative*
- [23] Suhirwan, L. Y. (2018). Strategi Pertahanan Dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara Di Perbatasan Laut Manado Sulawesi Utara Tahun 2017. *Membangun Indonesia: Resolusi Konflik Sosial Lintas Prespektif*. Indonesia Qualitative Reseacher Association (IQRA).
- [24] Suhirwan, S., & Prakoso, L. Y. (2019). Forum Maritim Kunci Sukses Penanggulangan Ancaman Asimetris di Selat Sunda. *Seminar dan Lokakarya Kualitatif Indonesia*, 13-20.
- [25] Sulistiawan, J., Syahtaria, I., Siantur, D., Prakoso, L. Y., Saragih, H. J., & Bangun, E. (2022). Sinergitas TNI dan BNPB Dalam Penanggulangan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Di Palu Guna Meningkatkan Pertahanan Nirmiliter Dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Negara. *Inovasi Penelitian*, 2,8,2841-2848.
- [26] Wayan Redita, L. Y. (2020). Implementasi kebijakan vessel traffic traffic services

direktorat jenderal perhubungan laut di selat sunda dalam keselamatan pelayaran terhadap strategi pertahanan laut. *Strategi Pertahanan Laut*, Vol 6,1,.

- [27] Yudho, P. L. (2020). Penguatan pertahanan negara melalui peningkatan keamanan laut di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. *Proceeding KKLN*. UNHAN.